



TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PROGRESIF DI INDONESIA

Awaliya

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Vivi Rahmadani Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Fidya Purnama

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dini Vientiany

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara

Korespondensi penulis: awaawaa32@gmail.com

Abstract. *Progressive Income Tax (PIT) is a tax system where tax rates rise proportionally with income. This ensures a fairer and more equitable distribution of the tax burden, while also encouraging higher contributions from those with greater financial means. Indonesia has a long history with PIT, but its implementation faces some hurdles. One key challenge is the lack of comprehensive and accurate data on taxpayer income. This makes it difficult to establish the appropriate tax bracket for each individual. Another obstacle lies in the prevalence of tax avoidance strategies. Wealthier taxpayers often exploit loopholes to minimize their tax obligations. Furthermore, public education regarding PIT remains inadequate. Many taxpayers lack a clear understanding of the system and its benefits for society. Despite these challenges, opportunities exist to strengthen the implementation of PIT in Indonesia. By leveraging information technology, the accuracy and completeness of taxpayer data can be significantly improved. Additionally, stricter enforcement of tax laws can deter non-compliant taxpayers. Finally, increased public education and outreach programs can raise awareness about PIT and its role in a just and equitable society. By addressing these challenges and capitalizing on existing opportunities, PIT can be a powerful tool for achieving fairness and equity in tax collection, as well as securing a larger contribution from high-income earners to the national treasury.*

Keywords: *Progressive Income Tax, Challenges, Opportunities, Fairness, Equity, State Revenue*

Abstrak. Pajak Penghasilan Progresif (PPH) adalah sistem perpajakan dimana tarif pajak naik secara proporsional dengan pendapatan. Hal ini menjamin distribusi beban pajak yang lebih adil dan merata, sekaligus mendorong kontribusi yang lebih tinggi dari mereka yang mempunyai kemampuan keuangan lebih besar. Indonesia memiliki sejarah panjang dengan PPH, namun implementasinya menghadapi beberapa kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya data yang komprehensif dan akurat mengenai pendapatan wajib pajak. Hal ini menyulitkan penetapan golongan pajak yang sesuai untuk setiap individu. Kendala lainnya terletak pada maraknya strategi penghindaran pajak. Pembayar pajak yang lebih kaya sering kali memanfaatkan celah untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Selain itu, pendidikan masyarakat mengenai PPH masih kurang. Banyak wajib pajak yang kurang memahami sistem dan manfaatnya bagi masyarakat. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, terdapat peluang untuk memperkuat implementasi PPH di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, keakuratan dan kelengkapan data wajib pajak dapat ditingkatkan secara signifikan. Selain itu, penegakan hukum perpajakan yang lebih ketat dapat menghalangi wajib pajak yang tidak patuh. Yang terakhir, peningkatan pendidikan masyarakat dan program penjangkauan dapat meningkatkan kesadaran tentang PPH dan perannya dalam masyarakat yang adil dan setara. Dengan mengatasi tantangantantangan ini dan memanfaatkan peluang yang ada, PPH dapat menjadi alat yang ampuh untuk

mencapai keadilan dan kesetaraan dalam pengumpulan pajak, serta menjamin kontribusi yang lebih besar dari masyarakat berpenghasilan tinggi ke kas negara.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Progresif, Tantangan, Peluang, Kewajaran, Pemerataan, Penerimaan Negara

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) progresif di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), merupakan pajak dengan tarif yang meningkat seiring dengan bertambahnya penghasilan. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan pajak, di mana individu dengan penghasilan lebih tinggi membayar lebih banyak pajak, sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, penerapan PPh progresif di Indonesia menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya basis data yang akurat tentang penghasilan wajib pajak, rendahnya tingkat kepatuhan pajak, dan kurangnya edukasi tentang PPh progresif. Meski begitu, ada juga peluang yang muncul, seperti meningkatnya penerimaan pajak, berkurangnya ketimpangan pendapatan, dan meningkatnya rasa keadilan pajak.

Untuk mengatasi tantangan ini dan memanfaatkan peluang, langkah-langkah yang perlu diambil meliputi memperkuat basis data penghasilan wajib pajak, meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang PPh progresif, dan memperkuat penegakan hukum di bidang perpajakan. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan PPh progresif dapat diterapkan secara efektif dan mencapai tujuannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji tantangan dan peluang implementasi pajak penghasilan progresif di Indonesia. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata yang kompleks, memberikan wawasan yang kaya dan terperinci tentang berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pajak tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pajak penghasilan progresif di Indonesia menghadapi tantangan yang rumit. Salah satu masalah utamanya adalah kompleksitas sistem pajak yang menghambat administrasi dan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Pejabat pajak dan pengusaha sering kali mengeluhkan bahwa peraturan yang rumit menyebabkan kesalahan dalam pelaporan pajak.

Di samping itu, terbatasnya kapasitas dalam institusi pajak, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, menjadi penghalang dalam mengumpulkan pajak secara efektif. Observasi langsung menunjukkan perlunya peningkatan pelatihan dan investasi dalam sistem teknologi informasi untuk mendukung administrasi pajak yang lebih efisien.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai peluang untuk meningkatkan implementasi pajak penghasilan progresif. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak melalui kampanye edukasi yang lebih intensif diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Edukasi yang disesuaikan dapat mengubah pandangan masyarakat tentang manfaat pajak untuk pembangunan negara.

Reformasi administrasi pajak, termasuk penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih, dianggap sebagai langkah krusial untuk menyederhanakan proses pajak dan mengurangi kesalahan administrasi. Ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pajak.

Peningkatan transparansi dalam penggunaan dana pajak dan penerapan audit yang ketat diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Langkahlangkah ini diharapkan dapat mengurangi ketidakpercayaan terhadap pengelolaan dana publik dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dukungan politik yang kuat dari berbagai lembaga pemerintah dan penerapan kebijakan progresif juga dianggap penting untuk kesuksesan implementasi pajak penghasilan progresif. Konsistensi dalam kebijakan serta dukungan menyeluruh dari berbagai pihak berkepentingan akan memperkuat implementasi pajak yang lebih efektif dan adil di Indonesia.

Secara keseluruhan, meskipun menghadapi tantangan yang kompleks, pendekatan yang terfokus dan dukungan yang menyeluruh dapat mengoptimalkan peluang keberhasilan implementasi pajak penghasilan progresif di Indonesia, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

KESIMPULAN

Implementasi pajak penghasilan progresif di Indonesia menghadapi tantangan yang besar seperti kompleksitas sistem pajak, rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan keterbatasan kapasitas dalam institusi pajak. Kompleksitas sistem pajak menjadi kendala utama yang menghambat proses administrasi dan meningkatkan risiko kesalahan pelaporan, yang diakui oleh pejabat pajak dan pengusaha. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan berbagai peluang untuk meningkatkan implementasi pajak penghasilan progresif. Usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak melalui kampanye edukasi yang lebih intensif diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, reformasi administrasi pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang lebih mutakhir dianggap penting untuk menyederhanakan proses pajak dan mengurangi kesalahan administratif. Langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana pajak dan penerapan sistem audit yang ketat diharapkan dapat memperbaiki kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Ini merupakan langkah penting dalam mengurangi ketidakpercayaan terhadap pengelolaan dana publik dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, meskipun menghadapi tantangan yang kompleks, pendekatan yang terfokus pada reformasi administrasi pajak, peningkatan transparansi, edukasi masyarakat, dan dukungan politik yang kuat dapat mengoptimalkan kesempatan untuk berhasilnya implementasi pajak penghasilan progresif di Indonesia. Harapan utamanya adalah meningkatkan penerimaan pajak negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- World Bank. (2020). Indonesia Economic Prospects: Promoting Public Revenue Mobilization diakses dari <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesiaeconomic-prospects-promoting-public-revenue-mobilization>
- Ministry of Finance, Republic of Indonesia. (2020). Indonesia Tax Outlook. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Schneider, F., & Enste, D. H. (2000). Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences. *Journal of Economic Literature*, 38(1), 77-114.
- Bird, R. M. (2011). Taxation and Development: Lessons from the Literature. UNU-WIDER Working Paper No. 2011/30. Helsinki: UNU-WIDER.
- Mookherjee, D., Png, I. P. L., & Ray, D. (2002). Decentralization, Corruption, and Government Accountability: An Overview. *International Journal of Political Economy*, 32(4), 54-71.
- OECD. (2019). OECD Tax Policy Reviews: Indonesia 2019. Paris: OECD Publishing.
- Djankov, S., Ganser, T., McLiesh, C., Ramalho, R., & Shleifer, A. (2010). The Effect of Corporate Taxes on Investment and Entrepreneurship. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2(3), 31-64.